

INTEGRASI BASIS DATA SYARAT MUTLAK PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI E-GOVERNMENT

Wimmie Handiwidjojo, Budi Sutedjo Dharma Oetomo

Staf Edukatif Prodi Sistem Informasi Universitas Kristen Duta Wacana

Jl. Dr. Wahidin 5-19 Yogyakarta, Telp. 0274-563929

email:whanz@ukdw.ac.id, budi@ukdw.ac.id

Abstract

Starting from the case of the final voter list in the Indonesia parliamentary election 2009, which made many Indonesian voters could not give his choice, the government should know that the implementation of e-Government based on the Information Technology has not been managed well yet. The managing of e-Government has been far away from the goal. Developing of e-Government does not mean building the government web site, which provide information in a static webpage, but it depends on some aspects such as information system design that used to manage data, database design and the computer network infrastructure that has been used.

The method of developing information system for e-Government in Indonesia has been done step by step and partially, where every department developed its own IT system.. The developing of IT system in each department was not base on the integrated IT blue print of the Indonesia Government. It has not been planned well. The results of this caused the integration of the database is being difficult. The blue print is very important for making a standard of data format, coding, type of DBMS, protocol, etc. When the Indonesia e-Government was built on a good information system design and based on an integrated database standard, hopefully the problem of the final voter list would not occur in this Indonesia parliamentary election 2009.

Keywords: Information System, e-Government

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) legislatif telah berlangsung pada tanggal 9 April 2009 yang lalu. Namun, sebelum pemilu berlangsung telah banyak pihak yang mengkhawatirkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bakal digunakan oleh pemerintah untuk menentukan warga Negara yang memiliki hak pilih. Kekhawatiran tersebut muncul, karena dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah hal itu telah menjadi dasar lahirnya konflik contohnya adalah kasus pemilihan kepala daerah Jawa Timur yang berakhir dengan perselisihan yang diakibatkan oleh DPT yang tidak akurat.

Berangkat dari kasus tersebut, pemerintah pusat sudah diingatkan terus menerus oleh partai politik dan masyarakat untuk segera meninjau dan memperbaiki DPT tersebut, tetapi pemerintah beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap percaya bahwa DPT yang digunakan untuk pemilu legislatif sudah dimutakhirkan. Al hasil, sehari setelah pemilu dilangsungkan, gelombang protes mulai bermunculan. Dimana hingga hari ke 11 ini ditengarai antara 30-40% pemilih kehilangan hak pilih. Salah satu sebabnya adalah mereka tidak tercantum dalam DPT. Kini pemerintah dan KPU menuai protes keberatan bahkan tuntutan serta upaya hukum dari masyarakat yang diperkirakan berupa *Class Action*.

Kisruh DPT ini tentu saja cukup ironis di tengah upaya pemerintah mensosialisasikan gerakan e-Government, dimana teknologi informasi (TI) menjadi tumpuan untuk melakukan pengelolaan pemerintahan. Pembangunan e-Government tersebut tentu tidak semata-mata identik dengan pembuatan situs Web pemerintah yang hanya untuk menyajikan informasi secara statis, melainkan juga menciptakan aliran data dan sistem informasi (SI) yang lebih sederhana dan mudah untuk diakses masyarakat dan dunia usaha disamping juga dukungan infrastruktur jaringan komputer yang jika diabaikan akan mengacaukan sistem aplikasi yang sudah dibangun dengan baik.

PERMASALAHAN

e-Government yang ideal tentu membutuhkan dukungan SI dan sistem basis data yang baik serta teknologi jaringan yang handal. Oleh karena itu, proses rancang bangun SI dan sistem basis data menjadi titik kritis dari keberhasilan pembangunan e-Government yang ideal. Persoalan yang mendesak adalah meninjau sistem basis data yang diterapkan dalam pembangunan SI e-Government untuk memberikan layanan kepada publik.

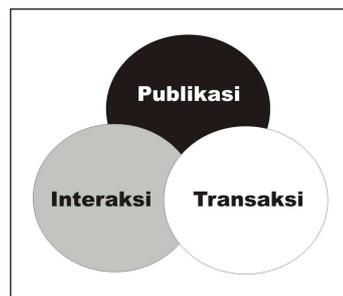
2. DASAR TEORI

e-Government

e-Government lahir dan berkembang karena didorong oleh beberapa hal, antara lain: *pertama*, percepatan globalisasi yang mendorong bergulirnya perdagangan bebas antar negara. *Kedua*, perkembangan yang revolusioner dari TI, sehingga kini teknologi telah menjadi infrastruktur utama dalam pembangunan sistem dan aliran informasi yang menjadi urat nadi pemerintahan yang sehat. *Ketiga*, tuntutan efisiensi dan efektivitas pengelolaan negara agar memiliki daya saing dan daya pikat untuk mengalirnya investasi dari luar negeri, sehingga pembentukan *good corporate governance*, transparansi pengelolaan pemerintahan dan isu-isu lain yang menghendaki keterbukaan pemerintah baik dalam mengelola layanan bagi masyarakat maupun hubungannya dengan dunia usaha semakin mendesak. *Keempat*, lahirnya perusahaan-perusahaan digital, yaitu perusahaan-perusahaan dimana hampir semua proses bisnis dan hubungan dengan pelanggan, pemasok, mitra kerja dan karyawan dimungkinkan dilakukan secara digital dan aset-aset utama perusahaan juga dikelola secara digital (Laudon, 2004, 6).

Namun, tidak mudah untuk merumuskan definisi e-Government karena setiap negara memiliki skenario penerapan yang berbeda satu sama lain. Selain itu aplikasi SI yang dibangun dalam departemen dan perusahaan pemerintah untuk memberi layanan manajerial secara internal dan layanan kepada publik sangat beragam berdasarkan sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi dan sistem pertahanan negara yang bersangkutan.

Meskipun definisi tentang e-Government sangat beragam, namun secara umum e-Government dapat dirumuskan sebagai mekanisme interaksi internal dalam departemen dan perusahaan pemerintah dan internal antara pemerintah dengan masyarakat (*Government to Citizen, G2C*) dan dunia usaha (*Government to Business, G2B*) serta antar pemerintah (*Government to Government, G2G*) dan pihak-pihak berkepentingan lainnya berbasis TI khususnya Internet. Mekanisme baru yang mengeksplorasi pengguna TI tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyajian informasi dan pembangunan, hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak berkepentingan secara lebih komunikatif, kemudahan, kesederhanaan dan kecepatan layanan administratif dan transaksi yang transparan dan akurat.



Gambar 1. Ruang lingkup e-Government
(Sumber: Winarno, 2004, 23)

Pemerintah yang berhasil membangun e Government dapat menikmati sejumlah manfaat, antara lain: perbaikan kualitas dan kinerja pelayanan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan; peningkatan transparansi, kontrol dan keakuratan penyelenggaraan pemerintahan; pengurangan secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait untuk keperluan aktifitas sehari-hari; memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada serta memberdayakan masyarakat dan dunia usaha lokal sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis (Indrajit, 2002,5)

Di samping itu, sistem e-Government diharapkan dapat meningkatkan akurasi data kependudukan dan dunia usaha, sehingga dapat dilakukan pemetaan secara tepat, baik sosial maupun demografinya untuk menunjang pembentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk. e-Government menciptakan potensi penghematan yang berasal dari sejumlah besar pembelanjaan sektor publik dan dari peluang untuk membuat proses internal lebih efisien (Kartajaya, 2003, 329). Selain itu, e-Government juga bermanfaat untuk pembangunan strategi hubungan antar organisasi dan sub organisasi pemerintahan dalam berbagai level.

Jenis-Jenis Layanan e-Government

Penerapan e-Government diharapkan dapat melahirkan beragam layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Ragam layanan yang akan dibangun berdasarkan ruang lingkup e-Government, yaitu publikasi, interaksi dan transaksi tersebut akan menentukan jenis aplikasi yang akan digunakannya.

Publikasi merupakan penerapan e-Government yang paling mudah dan sederhana. Aplikasi ini dapat terlihat dari pembangunan Web yang hanya sekedar menyajikan informasi yang sifatnya satu arah, dimana pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait.

Dengan hanya memanfaatkan halaman dan situs Web, pemerintah dapat menyajikan informasi-informasi seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan pemerintah, prosedur-prosedur pendirian dan penutupan perusahaan, data-data statistik untuk menunjang penelitian, informasi dan berita-berita resmi lainnya.

Interaktif merupakan ruang lingkup dan jenis layanan yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan penduduk dan semua pihak yang terkait. Untuk mewujudkan layanan ini, pemerintah perlu menyediakan saluran di mana penduduk dan pihak terkait dapat melakukan interaksi baik berupa umpan balik, masukan maupun untuk berdiskusi baik secara langsung, misalnya dengan memanfaatkan fasilitas berupa *Chatting*, *News Group*, *teleconference*, *Web-TV*, maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan fasilitas berupa *e-Mail*, *Mailing list* dan lain sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk aplikasi interaktif ini digunakan untuk terjadinya dialog langsung atau tidak langsung antara pemerintah dengan masyarakat, tanya jawab atau konsultasi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan tender proyek dan lain sebagainya.

Transaksi adalah jenis layanan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data dan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Aplikasi ini tergolong sangat rumit dibandingkan dengan dua ruang lingkup sebelumnya. Untuk penerapan ruang lingkup ini dibutuhkan SI untuk penanganan dan pengolahan data serta distribusi informasi yang dihasilkannya.

Oleh karena kebutuhan penduduk sangat beragam, maka jenis SI yang dibutuhkan juga bervariasi, seperti: SIDUGA (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga) untuk penanganan layanan pembuatan dan pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan penerbitan akte lahir, surat kematian, surat nikah, kartu keluarga, SIM (Surat Ijin Mengemudi), SI untuk pembuatan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), HO (Ijin Usaha) dan ijin keramaian, SI untuk pembayaran pajak, seperti PBB (Pajak Bumi Bangunan), pajak kendaraan bermotor, PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Sistem Pemilu Online dan masih banyak lagi ragam dan jenis SI yang menunjang pembangunan sistem e-Government.

Pembangunan beragam SI yang digunakan untuk melayani kebutuhan penduduk, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya diharapkan akan menyederhanakan proses dan menekan terjadinya pelanggaran dan tindak korupsi, karena semua proses dapat dilakukan lewat komputer dan jaringan Internet tanpa tatap muka dengan petugas.

Infrastruktur Teknis

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki sejumlah infrastruktur teknis sebagai modal dasar untuk membangun sistem e-Government. Hal ini tampak pada konsep N21 (Nusantara 21), meski belum sepenuhnya terwujud. N21 merupakan konsep pembangunan jaringan tulang punggung Nusantara, kota multimedia dan pusat akses komunitas multimedia yang memungkinkan penduduk untuk berkomunikasi secara verbal, visual maupun digital dimana dan kapan saja (Dharma Oetomo, 2002, 72).

Pengintegrasian sarana komunikasi, jaringan dan terminal-terminal komputer di Indonesia dimungkinkan, karena Indonesia telah memiliki infrastruktur berupa SKSD (Sistem Komunikasi Satelit Domestik) Palapa yang diluncurkan tanggal 9 Juli 1976, yang kemudian disusul berturut-turut Palapa A2, B1, B2, B2P, B2R, B4 dan Telkom-1 yang diluncurkan tanggal 13 Agustus 1999 sebagai pengganti Palapa B2R. Satelit Telkom-1 ini mampu memberikan layanan telekomunikasi secara fleksibel, antara lain VSAT (Very Small Aperture Terminal) yang memungkinkan komunikasi antar pelanggan di daerah terpencil. Di samping itu, pemerintah juga sudah mengembangkan teknologi telepon ISDN (Integrated Services Digital Network) yang diberi nama PASOPATI (Paduan Solusi Pelayanan Teknologi Informasi) yang akan menghubungkan seluruh propinsi bahkan kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia.

Sampai Juni 2001, sebanyak 26 ibukota propinsi telah terhubung ke infrastruktur TI nasional dan internasional. Khusus untuk pulau Jawa sudah terpasang SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) dengan rute Utara dan Selatan. Sistem GMD (Gelombang Mikro Digital) yang dioperasikan baik sebagai jaringan tulang punggung, maupun jaringan akses. Sementara itu, SKSD digunakan untuk menjangkau daerah terpencil dan memberikan layanan *broadcasting*, sedangkan untuk daerah di luar pulau Jawa digunakan GMD dan SKSD. Di samping itu, di Indonesia juga sudah tersedia berbagai macam infrastruktur alternatif yang diusahakan oleh perusahaan BUMN dan swasta, seperti DSL (Digital Subscriber Line), VoIP, Wireless Networking dan lain sebagainya.

Peran Basis Data Dalam Sistem Informasi

Basis data merupakan komponen terpenting dalam pembangunan SI, karena basis data tempat untuk menampung dan mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem, sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Basis data merupakan himpunan kelompok data yang

saling berkaitan satu sama lain, yang diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga tidak terdapat duplikasi yang tidak perlu, agar dapat diolah atau dieksplorasi secara cepat dan mudah untuk menghasilkan informasi.

Sistem basis data ini telah terus menerus dikembangkan oleh para ahli agar dapat diperoleh cara pengorganisasian data yang efisien dan efektif. Hal ini diperlukan karena basis data menjadi tumpuan manajemen informasi lembaga.

Beberapa perbaikan telah dilakukan oleh para ahli terhadap sistem pengorganisasian basis data tradisional, yaitu dengan mengembangkan sebuah sistem pengolahan basis data, sehingga seluruh data yang terdapat di dalam SI dapat diintegrasikan. Sementara itu, aplikasi per departemental yang dibangun dapat melakukan akses terhadap basis data yang tersedia berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Memang model ini akan menghadapi tantangan berupa pengaturan hak akses, karena seluruh basis data terintegrasi menjadi satu kesatuan dan memungkinkan untuk diakses secara bersama-sama. Meskipun demikian, sistem ini memiliki sejumlah kelebihan di dibandingkan dengan sistem tradisional, seperti bebas dari kemungkinan redundansi, basis data dapat diakses tanpa tergantung pada program aplikasi tertentu, tingkat keamanan meningkat, penggunaan data bersama lintas departemental memungkinkan dihasilkannya laporan yang lengkap, integral dan obyektif.

3. PEMBAHASAN

Sistem Informasi e-Government

Usaha untuk mewujudkan e-Government di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun yang lalu dengan kebijakan untuk membangun N21, serta penyediaan layanan Internet dan pembangunan situs-situs departemen-departemen pemerintah dan BUMN. Namun sebagian besar situs-situs pemerintah hanya memberikan informasi. Dalam situs-situs tersebut belum tersedia layanan transaksi *online*.

Memang untuk memberikan layanan transaksi secara *online*, berarti situs-situ tersebut juga harus dilengkapi dengan aplikasi SI yang akan menampung, mengintegrasikan dan mengolah data serta menyimpan, menyajikan dan mendistribusikan informasi yang dihasilkannya. Tanpa aplikasi SI yang didukung sistem basis data yang memadai, maka sistem e-Government tidak dapat didayagunakan untuk memberikan layanan seperti pembuatan dan pembaharuan KTP, SIM, penerbitan akte lahir dan kartu keluarga, pembuatan IMB, HO, pembayaran pajak, pengajuan tender-tender terhadap proyek-proyek pemerintah, manajemen aset daerah, manajemen pendapatan asli daerah, penanaman modal dan lain sebagainya.

Kebutuhan SI untuk mendukung sistem e-Government memang sangat mendesak, namun pembangunan SI untuk suatu aplikasi yang sangat kompleks seperti SIDUGA, perpajakan, tagihan listrik, telepon dan air minum secara terintegrasi bukanlah hal yang mudah. Saat ini, proses komputerisasi tampaknya baru terbatas pada masing-masing departemen atau BUMN.

Pembangunan SI dalam ruang lingkup e-Government di Indonesia dilakukan secara bertahap mulai dari masing-masing departemen atau BUMN. Namun tampaknya pembangunan SI per departemen atau BUMN tersebut tidak didasarkan pada suatu rencana induk, sehingga kelak akan sulit mengintegrasikan basis datanya menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Kecurigaan terhadap tidak adanya rencana induk tersebut didasarkan pada format dasar pemasukan data antar departemen tidak sama, sehingga pencatatan data seorang warga negara di dalam SIDUGA berbeda dengan format yang terdapat pada departemen pendidikan dan departemen-departemen lainnya.

Rencana induk itu sangat penting untuk membuat standar format dan kode data, penyajian informasi hingga standar bahasa komputer dan protokol yang digunakan. Standar tersebut akan menjadi dasar untuk mengintegrasikan SI yang dibangun secara terpisah oleh departemen-departemen pemerintah dan BUMN. Apabila standar dan format yang digunakan berbeda satu dengan yang lain, maka proses pengintegrasian akan sulit untuk dilakukan.

Memang secara sekilas pembangunan SI secara bertahap tersebut merupakan langkah yang paling memungkinkan untuk membangun SI e-Government yang skalanya sangat besar, kompleks dan rumit. Namun, SI yang dibangun secara terpisah dari masing-masing departemen dan BUMN tersebut memiliki arsitektur yang berbeda-beda dan harus segera operasional. Dengan demikian tidak terhindarkan terjadinya redundansi dan inkonsistensi data. Sebagai contoh, data penduduk yang tercatat pada SI akte lahir dapat berbeda dengan data penduduk yang tercatat pada saat pembuatan SIM atau pembayaran pajak. Hal ini juga tampak dari kisruhnya DPT dalam pemilu legislatif 2009 yang baru lalu, karena pemerintah menggunakan data yang dihimpun oleh Departemen Dalam Negeri, dimana hal itu berbeda dengan daftar kependudukan yang dimiliki oleh Badan Statistik Negara yang digunakan oleh pemerintah saat pemilu tahun 2004.

Perbedaan tersebut dapat diakibatkan oleh tidak adanya berkas data penduduk yang standar yang diakses bersama, dimana masing-masing departemen memiliki sistem pencatatan data penduduk yang berbeda-beda. Di samping itu, perbedaan juga dapat diakibatkan oleh masalah-masalah teknis seperti penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, singkatan nama dan sebab-sebab lain.

Adanya redundansi dan inkonsistensi data tersebut akan menjadi hambatan yang tidak ringan jika ingin mengintegrasikan berkas data yang terbentuk melalui SI departemental dan BUMN menjadi satu kesatuan. Kondisi ini juga menjadi hambatan bagi departemen pemerintah dan BUMN untuk melakukan pengintegrasian

sistem dengan lembaga atau perusahaan swasta dalam rangka kemitraan dan penciptaan sinergi, seperti pembayaran rekening listrik dan telepon lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau aplikasi Internet yang diselenggarakan oleh perbankan Swasta seperti BCA, Danamon, Niaga dan lain sebagainya.

Integrasi Basis Data

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut di atas, maka pembangunan aplikasi e-Government dimana masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memperoleh layanan terintegrasi, memang tidak dapat dilakukan secara cepat. Pembangunan e-Government membutuhkan kebijakan-kebijakan seperti:

1. Pembuatan rencana dan rancangan induk pembangunan SI dan sistem basis data e-Government yang disepakati untuk menjadi dasar pijakan pengembangan SI yang bersifat lintas departemental dan sektoral.
2. Kebijakan dan kesepakatan untuk menjadikan berkas data penduduk, perusahaan dan data induk lainnya menjadi sumber data utama dari SI yang dibangun oleh departemen atau BUMN, sehingga dapat mengurangi bahkan meniadakan redundansi dan inkonsistensi data.
3. Menyatukan berkas-berkas data dari masing-masing departemen dan BUMN dalam suatu sistem pengolahan basis data yang standar dan terpadu, sehingga tidak terpisah-pisah satu sama lain, melainkan terintegrasi menjadi satu kesatuan.
4. Pembuatan standar teknologi yang digunakan untuk pembangunan sistem e-Government tersebut, agar dapat memudahkan proses pengintegrasian seluruh sistem departemen atau BUMN nantinya.
5. Pembuatan suatu aplikasi Web yang akan menjadi *interface* untuk akses data dan informasi yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait, sehingga tercipta kemudahan untuk mengakses. Disamping itu ada sistem penggunaan dan pengaturan hak akses yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pihak eksternal dan pihak internal departemen dan BUMN yang ada.

Secara umum, pengintegrasian SI ini bukanlah hal yang mudah dan murah. Tidak mudah dilakukan karena SI dan sistem basis data yang sudah terbentuk memiliki standar yang berbeda satu sama lain dan tidak berdasarkan suatu rencana induk bersama. Di samping itu, kebijakan antar daerah satu dan lainnya juga ada perbedaan menyusul diberlakukannya otonomi daerah.

Untuk melakukan pengintegrasian sistem basis data dari berbagai departemen dan BUMN membutuhkan beberapa langkah, antara lain:

1. Persamaan persepsi lintas departemen dan BUMN terhadap item-item data yang akan dicatat dan dikelola dalam sebuah sistem basis data.
2. Pembuatan sistem basis data yang terintegrasi yang dapat diakses secara lintas departemen dan BUMN yang bebas redundansi, sehingga terhindar dari inkonsistensi data. Hal ini perlu ditangani oleh suatu tim khusus lintas departemen dan BUMN yang dapat merumuskan sistem basis data yang terintegrasi.
3. Pembuatan format pemasukan data yang standar, karena hal itu dapat mencegah terjadinya perbedaan dalam proses pencatatan data.
4. Melakukan audit terhadap sistem basis data, sehingga diperoleh basis data yang terbebas dari kesalahan. Di samping itu, proses audit dapat mengidentifikasi kesalahan sedini mungkin, sehingga akan mencegah terjadinya kekisruhan data.

Pemanfaatan Basis Data Terintegrasi

Basis data yang terintegrasi tidak hanya bermanfaat untuk mengatasi kisruh DPT dalam pemilu, karena basis data dalam system e-Government yang terintegrasi dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada publik. Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah dapat memahami benar kondisi riil dari rakyat, sehingga pemerintah dapat membuat program-program kerja yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga dapat menggunakan basis data itu untuk membuat perencanaan anggaran belanja dan pendapatan, karena pemerintah mengetahui potensi dan kebutuhan dari rakyat secara lebih akurat. Program-program pemerintah seperti keluarga berencana, wajib belajar, peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan dan lain sebagainya dapat tepat pada sasaran.

Basis data yang terintegrasi juga dapat digunakan untuk memberikan layanan publik secara cepat dan akurat seperti pembuatan surat lahir, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat ijin mengemudi, surat ijin mendirikan bangunan, surat ijin usaha, layanan kesehatan bagi keluarga terbatas ekonomi dan berbagai layanan publik lainnya.

4. KESIMPULAN

Kisruh dalam pembuatan DPT untuk pemilu tentu saja dapat dihindarkan bilamana sistem e-Government yang dibangun didasarkan pada SI dan sistem basis data yang standar dan terintegrasi. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kinerja dan layanannya kepada publik.

Untuk mewujudkan sistem e-Government sesuai dengan ruang lingkupnya yang terdiri dari publikasi, interaksi dan transaksi bukanlah hal yang mudah, khususnya pembangunan aplikasi SI e-Government yang menunjang terwujudnya layanan transaksi secara terpadu, karena membutuhkan pengintegrasian SI dan sistem basis data e-Government. Namun pembangunan sistem e-Government tersebut masih memiliki peluang untuk diwujudkan mengingat sejumlah infrastruktur teknis telah tersedia.

Memang di satu sisi, pembangunan SI masing-masing departemen dan BUMN dinilai cukup menggembirakan dan dapat menjadi modal dasar, tetapi tanpa adanya rencana dan rancangan induk yang disepakati bersama secara lintas departemental dan sektoral akan mempersulit dan tidak jarang memperlambat pembentukan sistem e-Government yang terintegrasi dan terpadu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dharma Oetomo, Budi Sutedjo, 2002, "*Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*", Penerbit Andi, Yogyakarta
- Indrajit, Richardus Eko, 2002, "*Electronic Government: Strategi, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*", Penerbit Andi, Yogyakarta
- Kertajaya, Hermawan, 2003, "*MarkPlus in Strategy*", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Laudon, Kenneth C, Laudon, Jane P, 2004, "*Management Information Systems: Managing The Digital Firm*", Prentice Hall, New Jersey
- Winarno, Wing Wahyu, 2004, "*Electronic Government*", Teropong Edisi 01/Th 1/2004, halaman 23-24